

KKN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh :

Dr. H. Ravik Karsidi, MS
Drs. H. Trisno Martono, MM
Drs. Partono

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Sebelas Maret

Makalah

**Disampaikan dalam Rapat Kerja Pengelola KKN
PT se Jateng-DIY, oleh LPM UNS di Hotel Agas Internasional
Solo, 4 Mei 2000**

KKN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*)

Ravik Karsidi, Trisno Martono, dan Partono

LPM Universitas Sebelas Maret

PENGANTAR

1. Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) yang dirintis pelaksanaannya sejak tahun akademik 1971/1972 di beberapa perguruan tinggi, kini telah dicoba pelaksanaannya oleh hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Setiap perguruan tinggi pelaksana mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dan bisa mengambil manfaat dari tujuan yang telah ditetapkannya.
2. KKN secara umum merupakan suatu bentuk program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upayanya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa untuk mendapatkan nilai tambah pendidikan tinggi. KKN dilaksanakan guna meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan memberi pendidikan pelengkap bagi mahasiswa sekaligus membantu masyarakat melancarkan pembangunan di lokasi KKN dilaksanakan.
3. KKN diselenggarakan dengan bertolak dari permasalahan nyata dalam masyarakat yang didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi, KKN berdimensi luas, pragmatis dan praktis. Bagi mahasiswa peserta, KKN seharusnya dirasakan sebagai pengalaman belajar, suatu pengalaman belajar yang tidak dapat diperoleh di dalam kampus. Dengan mengikuti KKN mahasiswa seharusnya memiliki pengetahuan baru, perasaan baru, kemampuan baru, dan kesadaran baru tentang problem dan bagaimana memecahkan yang dihadapi masyarakat bangsanya, tentang tanah airnya dan tentang bagaimana seharusnya dirinya berperan lebih jauh. Dengan demikian, melalui keikutsertaan dalam KKN, akan merupakan pengalaman belajar baru yang sangat berguna sebagai bekal sebelum menjadi sarjana/ahli. Bagi masyarakat, dengan dilakukan KKN di tempatnya seharusnya memperoleh peningkatan bantuan terutama sumbangan pemikiran dan dorongan untuk merubah atau meningkatkan cara berpikir, pengetahuan, dan ketrampilannya sehingga dapat meningkatkan potensinya dan berkembang secara mandiri.

*)Pokok-Pokok Pikiran Rapat Kerja Pengelola KKN PT se JATENG-DIY, di LPM UNS, Hotel Agas Solo 4 Mei 2000.

4. Saat ini sedang terjadi suatu proses perubahan yang sangat cepat di masyarakat kita. Krisis ekonomi dan krisis politik yang terjadi bersamaan, serta terjadinya paksaan terhadap Indonesia untuk meliberalkan ekonominya, akan menimbulkan implikasi yang luas pada saat ini dan masa depan. Di pihak lain, di masyarakat sedang terjadi gerakan dan kesadaran atas demokratisasi yang luas, dan tuntutan pembangunan nasional yang sedang berkembang ke arah pemenuhan solusi atas isue-isue global tentang otonomi daerah, reformasi, mekanisme pasar, dan globalisasi informasi, dengan segala perilaku budaya yang menyertainya.
5. Peran perguruan tinggi (terutama aspek kegiatan pengabdian kepada masyarakat) harus diarahkan untuk mampu bersama masyarakat mencari solusi atas permasalahan dan tuntutan sejalan dengan proses perubahan tersebut. KKN sebagai salah satu kegiatan unsur sivitas akademika harus diarahkan untuk menunjang peran perguruan tinggi tersebut secara optimal.

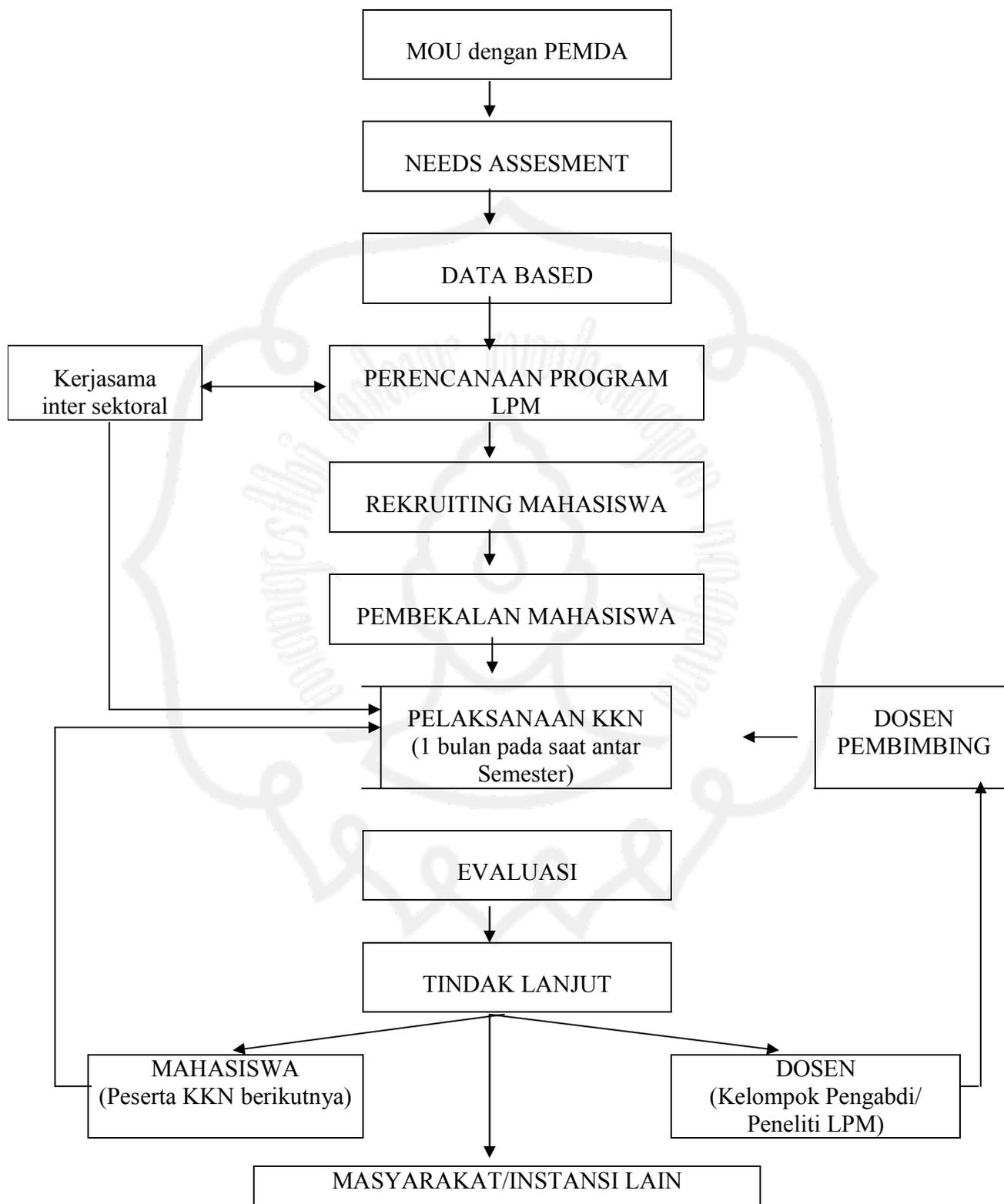
KKN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Dari pengalaman menjalankan KKN, didalamnya terdapat tiga unsur penting yang terkandung, yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai kegiatan yang bermuatan pendidikan, KKN membawa mahasiswa peserta untuk berkenalan secara langsung dengan masyarakat dan permasalahannya, serta membantu mencari solusi dengan pendekatan interdisipliner. Sebagai kegiatan yang bermuatan penelitian, mahasiswa diajak melakukan pemahaman dan analisis potensi masyarakat (dengan bantuan dosen pembimbing) sehingga mampu memberikan sumbangan pemikiran kritis atas solusinya. Sebagai kegiatan pengabdian masyarakat, KKN dapat menjadi wahana mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni bagi pemecahan masalah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, KKN dapat dimaknai sebagai bentuk pengintegrasian kegiatan intrakurikuler pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara interdisipliner.
2. Perimbangan bobot ketiga kegiatan intrakurikuler pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa perlu ditinjau efektivitasnya secara realistis. Pembebanan pada program KKN dengan pembobotan yang seimbang dari ketiga muatan tersebut hanya akan memberatkan bagi pelaksana, dan sekaligus menggali kegagalan bila dilakukan evaluasi atas pencapaiannya. Untuk itu, perlu penekanan bobot utama dari salah satu muatan tersebut pada pengabdian kepada masyarakat.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa seharusnya dilakukan secara integred dengan salah satu peran sosial perguruan tinggi. Hal ini harus dikaitkan dengan peranan perguruan tinggi agar mampu mempengaruhi perubahan masyarakat secara sistematis dan berdampak luas di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, maka program KKN perlu dirancang dan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tuntutan perubahan yang dikehendaki masyarakat. Dengan segala keterbatasan perguruan tinggi, KKN sebaiknya merupakan bagian dari upaya pengembangan model pembangunan yang berbasis masyarakat dan keilmuan, sehingga penyebarannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Pelaksanaan KKN berarti tidak perlu standar dan massal. Artinya, bahwa setiap periode pelaksanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan masukan keilmuan perguruan tinggi, dan bagi mahasiswa tidak harus merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa tetapi bersifat pilihan agar mereka yang memilihnya benar-benar sesuai minat mereka. Mengingat keterbatasan waktu mahasiswa, waktu KKN dapat dipertimbangkan menjadi sekitar sebulan, dengan memanfaatkan waktu jeda antar semester. Dengan demikian siklus perkuliahan mahasiswa di kampus tidak terganggu namun tetap tersalurkannya minat mereka bagi pengembangan masyarakat.
4. Perencanaan program KKN sebaiknya dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan bagi pengembangan masyarakat dimana KKN akan dilakukan (Pemda, swasta, unsur masyarakat) sebagai perencanaan bersama, sehingga pada pelaksanaannyapun juga menjadi tanggung jawab bersama dari yang terlibat merencanakannya. Agar terarah dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, sebaiknya diawali dengan pelaksanaan *needs assesment* dan penyusunan *data based* yang menjadi sumber acuan perencanaan program dan evaluasi KKN.
5. KKN sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat bukanlah merupakan kegiatan setahap lalu selesai, namun harus seperti halnya masalah dan kebutuhan masyarakat, yang berkembang terus. Untuk itu maka program tindak lanjut harus dilakukan. Program tindak lanjut dapat berupa kegiatan oleh mahasiswa peserta KKN berikutnya ataupun oleh kelompok dosen pengabd/ peneliti dari universitas, dan bahkan oleh instansi lain yang terkait dan masyarakat sendiri. Dengan demikian, maka peran dosen pembimbing KKN sangat diperlukan, selain juga peran nara sumber dari instansi lain atau masyarakat demi keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

6. Skema alur penyelenggaraan KKN untuk pemberdayaan masyarakat, dapat digambarkan sebagai berikut :

SKEMA ALUR KKN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



7. Dari skema alur tersebut dapat diambil pengertian bahwa:

Tujuan KKN :

1. membekali mahasiswa kemampuan pendekatan masyarakat dan membentuk sikap dan perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan masyarakat
2. memberi kesempatan mahasiswa berlatih mengaplikasikan teori/ mentransfer ilmu, teknologi dan seni ke masyarakat
3. upaya pengembangan masyarakat dalam arti luas di wilayah tertentu (pemberdayaan masyarakat)

Status KKN :

1. bersifat pilihan (mata kuliah dengan 1 sks)
2. bersifat sukarela bagi mahasiswa

Peran LPM :

1. penyedia wilayah KKN
2. menyiapkan data based wilayah
3. melakukan needs assessment pengembangan bagi masyarakat
4. penempatan mahasiswa sesuai disiplin ilmu dan pembekalan kepada mahasiswa sebelum ke lapang

Pelaksanaan di lapangan:

1. bersifat problem solving
2. penerapan prinsip dan metode action research
3. pendekatan interdisipliner dan intersektoral
4. berorientasi pada manfaat bagi masyarakat

Waktu KKN : waktu jeda antar semester (1 bulan)

Sumber Biaya :

1. universitas (sumber dana LPM)
2. pemerintah daerah
3. sponsor/lembaga donor
4. mahasiswa (jika perlu)

SEMOGA BERMANFAAT.